



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP : 203.16/ OT.210/H.12.32/02/2026

Tanggal Pembuatan : 09 Februari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 09 Februari 2026

Disahkan oleh KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU

Dr. RUDI HARTONO, S.P., M.P.
NIP. 1973043019990310001

Nama SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sepanjang terkait dengan administrasi kepegawaian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, sepanjang terkait dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Kualifikasi pelaksana

- Pendidikan minimal SLTA.
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- Memiliki kemampuan mengolah data.
- Memahami Proses dan prosedur Kenaikan Pangkat.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Kenaikan Gaji Berkala - SOP SKP.	- Seperangkat Alat Komputer - Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambatnya kenaikan pangkat pegawai.	Rekapitulasi dan daftar pegawai yang naik pangkat.

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Nomor

: 203.16/ OT.210/H.12.32/02/2026

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU

Tanggal Penetapan

: 09 Februari 2026

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

Tanggal Revisi

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USUL KENAIKAN PANGKAT**SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU**

Pengertian

: Prosedur Usul Kenaikan Pangkat.

Tujuan

: Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Pegawai.

Kebijakan/Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sepanjang terkait dengan administrasi kepegawaian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, sepanjang terkait dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Prosedur

- Menerima berkas usulan kenaikan pangkat.
- Mengoreksi dan menyusun berkas kenaikan pangkat.
- Membuat konsep form D-1 Nota Persetujuan BKN.
- Membuat surat pengantar berikut daftar nama pegawai yang akan naik pangkat.
- Memaraf surat pengantar usulan kenaikan pangkat.
- Menyetujui dan menandatangani surat pengantar.
- Mengirimkan surat pengantar dan berkas kenaikan pangkat ke Eselon I.

		• Menunggu proses Nota Persetujuan BKN dan SK KP. • Monitoring proses persetujuan BKN dan Biro Kepegawaian. • Menerima dan mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat • Mendokumentasikan.
Keterkaitan	:	• SOP Kenaikan Gaji Berkala • SOP SKP

NO: 203.16/ OT.210/H.12.32/02/2026
SOP USUL KENAIKAN PANGKAT
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BALAI	KABAG TU	PENANGGUNG JAWAB	PEGAWAI YBS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Menerima berkas usulan kenaikan pangkat.					Berkas	3 hari	Berkas	
2	Mengoreksi dan menyusun berkas kenaikan pangkat.					Berkas		Berkas	
3	Membuat konsep form D-1 Nota Persetujuan BKN.					Nota Persetujuan		Nota Persetujuan	
4	Membuat surat pengantar berikut daftar nama pegawai yang akan naik pangkat.					Surat Pengantar		Surat Pengantar	
5	Memaraf surat pengantar usulan kenaikan pangkat.					Surat Pengantar		Surat Pengantar	
6	Menyetujui dan menandatangani surat pengantar.					Surat Pengantar	3 hari	Surat Pengantar	
7	Mengirimkan surat pengantar dan berkas kenaikan pangkat ke Eselon I.					Surat Pengantar Lampiran		Surat Pengantar Lampiran	
8	Menunggu proses Nota Persetujuan BKN dan SK KP.								
9	Monitoring proses persetujuan BKN dan Biro Kepegawaian.						1-3 bulan		
10	Menerima dan mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat.					SK Kenaikan Pangkat Tanda Terima	3 hari	SK Kenaikan Pangkat Tanda Terima	
11	Mendokumentasikan.					SK Kenaikan Pangkat Tanda Terima		SK Kenaikan Pangkat Tanda Terima	